

PERDEBATAN POLITIK DI RUANG *CYBER* SEBAGAI BENTUK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM FORUM DEBATE CLUB KASKUS

Oleh: Galuh Setyo Nugroho – 071211533043-B

Email: Galsngr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perdebatan politik di ruang *cyber* sebagai bentuk demokrasi deliberatif dalam forum *debate club* Kaskus. Kaskus merupakan sebuah media sosial dalam bentuk forum. Menjadi menarik ketika sebuah forum seperti Kaskus kemudian menyediakan sebuah forum yang dikhususkan untuk berbagi informasi dan memperdebatkan opini berdasarkan sudut pandang masing-masing yang berbeda. Perdebatan-perdebatan yang terdapat dalam forum *debate club* Kaskus diwacanakan sebagai bentuk demokrasi deliberatif dimana sebuah demokrasi mementingkan musyawarah dari aktor-aktor komunikasi di dalamnya. Selain itu, ruang *cyber* yang menjadi *second reality* telah mampu membuat sebuah contoh bentuk ruang publik yang dikonsepsikan oleh Jurgen Habermas. Kaskus mewacanakan sebuah bentuk ruang publik dengan gaya baru namun masih mengikuti aturan-aturan sebagai ruang publik di ruang nyata. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi perdebatan politik sebagai bentuk demokrasi deliberatif yang diartikulasikan melalui *thread-thread* serta *comment-comment* yang tertulis dalam forum *debate club*. Penelitian ini menganalisis teks yang muncul di *thread-thread* dalam *debate club* Kaskus menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* model Norman Fairclough. Berdasarkan hasil analisis, Kaskus sebagai sebuah media sosial dalam bentuk forum tidak hanya menciptakan sebuah model ruang publik dengan gaya yang baru. Namun juga berpotensi sebagai implementasi dari konsep demokrasi deliberatif di dunia nyata.

Kata Kunci : Perdebatan politik, Ruang publik, Demokrasi Deliberatif, Kaskus.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada perdebatan politik di ruang *cyber* sebagai bentuk demokrasi deliberatif dalam forum *debate club* Kaskus. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena di era seperti saat ini, ruang-ruang publik tidak hanya dapat ditemui di warung kopi atau sejenisnya saja, namun juga dalam ranah ruang *cyber*. Pemilihan kasus-kasus politik pada penelitian ini dengan alasan permasalahan politik di Indonesia saat ini menjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang sensitif untuk menjadi bahan pembicaraan orang disamping beberapa permasalahan lain seperti permasalahan sosial, permasalahan budaya dan permasalahan ekonomi. Konsep ruang publik pada awalnya bermula dari sebuah esai Jurgen Habermas (1962) berjudul "*The Structural Transformation of The Public Sphere*". Dalam esai tersebut, Habermas melihat perkembangan wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah tersebut diberi nama *public sphere*, yakni semua wilayah yang memungkinkan kehidupan sosial kita untuk membentuk opini publik yang relatif bebas. Ruang publik pada saat itu dilihat Habermas sebagai bentuk ruang baru dimana, dalam ruang

tersebut tidak terdapat dominasi sehingga orang mampu menyampaikan opininya secara bebas tanpa ada tekanan dari kaum dominan.

Perbedaan opini yang terjadi dalam sebuah ruang publik menjadi pemicu sebuah perdebatan. Keberadaan ruang publik serta aktifitas di dalamnya dalam dunia nyata masih menjadi sebuah bentuk bias. Menurut Maryani (2011), ruang publik berkembang dalam diskusi-diskusi langsung di tempat-tempat umum di mana kalangan intelektual berkumpul dan bertukar ide mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai filsafat, ekonomi, politik dan organisasi sosial. Dengan demikian, ruang publik terbentuk karena adanya proses pertukaran makna antar individu didalamnya.

Perdebatan yang muncul dalam ruang publik disebabkan adanya sebuah bentuk demokrasi yang deliberatif. Karena aturan dari ruang publik yang merupakan ruang yang bebas dari dominasi, maka konsep demokrasi dapat berkembang di dalamnya. Menjadi menarik ketika ruang *cyber* yang selama ini menjadi tempat untuk bertukar informasi dan memudahkan manusia untuk berkomunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu, mewacanakan sebuah bentuk ruang publik dan mempunyai aturan-aturan yang hampir mirip dengan ruang publik dalam dunia nyata. Salah satunya seperti media sosial yang berbentuk forum diskusi seperti Kaskus. Ruang *cyber* atau *cyberspace* sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh William Gibson (1984) dalam novelnya *Neuromancer*. Menurut Gibson :

“Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding”(Gibson. 1984)

Dalam hal ini *cyberspace* yang dimaksud dibentuk oleh teknologi komunikasi yang saat ini kita kenal dengan internet. *Cyberspace* sendiri terbentuk karena adanya koneksi atau jaringan dari berbagai komputer di seluruh dunia sehingga secara tidak langsung *cyberspace* membentuk sebuah dunia baru yang kita kenal dengan sebutan dunia maya. Terhubungnya jaringan – jaringan tersebut menghasilkan komunitas virtual (*virtual community*) yang di dalamnya kita dapat bertukar informasi mengenai berbagai hal.

Sehingga penulis menemukan beberapa keganjilan dalam ruang *cyber*. Pertama, ruang *cyber* yang merupakan tempat untuk bertukar informasi antar individu berpotensi menjadi media baru dalam membentuk sebuah ruang publik. Kebebasan yang ditawarkan Kaskus berbeda dengan media lain seperti *facebook* atau *twitter* yang lebih berfokus pada interaksi

sosial yang diciptakan. Sedangkan Kaskus, kebebasan untuk berargumen dan saling serang tanpa tahu latar belakang dari *user* lain menjadi salah satu keunikan dimana orang akan semakin bebas untuk berargumen atau bahkan saling menyerang argumen dengan ekstrim ketika orang tersebut tidak dapat diketahui latar belakangnya. Kedua, sebagai ruang publik di media baru, ruang *cyber* mempunyai potensi dalam melakukan perdebatan sebagai bentuk demokrasi deliberatif. Konsep demokrasi deliberatif berkembang pasca runtuhnya era orde baru di Indonesia. Pada masa orde baru, seluruh kritik dibatasi bahkan ditiadakan demi kelancaran urusan negara. Aturan-aturan tersebut runtuh bersamaan dengan runtuhnya kepemimpinan orde baru. Sehingga masyarakat pada saat itu berani untuk mengkritik hingga menyampaikan opininya di publik dan merupakan sebuah cara untuk mengembangkan demokrasi.

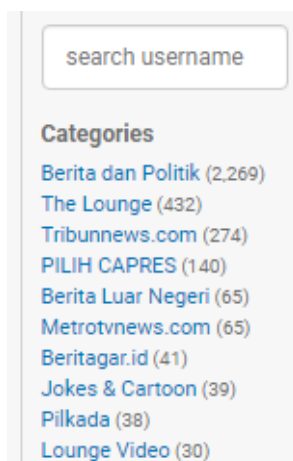
PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan pembacaan kritis terhadap *thread* dalam forum *debate club* yang berkaitan dengan perdebatan politik menggunakan analisis Norman Fairclough. Terdapat tiga hal yang menjadi fokus dari analisis kritis Norman Fairclough, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial (Eriyanto, 2001). Teks dalam penelitian ini adalah *thread* yang berkaitan dengan permasalahan politik serta *comment-comment* yang muncul dalam *thread* tersebut dan berkaitan dengan perdebatan politik sebagai bentuk demokrasi deliberatif. Praktik sosial dalam penelitian ini terkait dengan konsep ruang publik milik Jurgen Habermas serta perkembangan ruang publik di Indonesia. Sedangkan praktik diskursif pada bab ini adalah hubungan antara teks dengan praktik sosial. Dalam praktek diskursif berkaitan dengan interpretasi peneliti mengenai wacana perdebatan politik sebagai bentuk demokrasi deliberatif dalam forum *debate club* Kaskus

Pemilihan analisis terhadap *thread-thread* dalam forum *debate club* Kaskus ini berdasarkan asumsi dari peneliti mengenai kemunculan perdebatan dalam *comment* yang ada dalam *thread*. Forum *debate club* ini dikhususkan untuk para Kaskuser yang mempunyai pendapat dan perbedaan sudut pandang dalam melihat suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu, dalam setiap forum di Kaskus terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap Kaskuser, tidak terkecuali dalam forum *debate club*. Tata tertib ini tertulis dalam bentuk *thread* yang dibuat oleh moderator forum dan di *post* dalam bentuk *sticky notes* sehingga post tersebut akan muncul di setiap awal halaman utama forum..

Perdebatan menjadi sebuah kegiatan yang saat ini menjadi sering dilakukan, melihat banyaknya permasalahan-permasalahan ada di masyarakat, baik dalam hal sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut Suparlan dalam jurnalnya “*Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas : Memperjuangkan Hak – Hak Minoritas*” mengatakan bahwa masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Dalam kemajemukan ini memunculkan sebuah opini-opini yang berbeda dalam menelaah suatu permasalahan. Perbedaan opini ini muncul berdasarkan atas perbedaan pengalaman dan pengetahuan dari masing-masing individu atau dalam ilmu komunikasi dikenal sebagai *Field Of Experience* dan *Frame Of Reference*. *Field Of Experience* merupakan pengalaman yang didapat sejak individu lahir. Sedangkan *Frame Of Reference* merupakan referensi yang didapat melalui pembelajaran atau buku. Perbedaan opini ini yang kemudian memunculkan suatu perdebatan antara individu dengan individu lainnya.

Permasalahan-permasalahan di Indonesia kerap menjadi satu dari sekian bahan diskusi-diskusi kritis di dalam forum Kaskus. Permasalahan sosial, ekonomi, dan politik menjadi sorotan publik di era pasca Orde Baru ini. Terlihat dari jumlah *thread* berita sosial, ekonomi, dan terutama berita-berita politik yang terdapat dalam Kaskus.



Gambar 3.1 Jumlah *thread* tentang berita politik di Kaskus

Pada gambar 3.1 terlihat urutan sepuluh besar forum-forum dalam Kaskus yang membahas mengenai permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Banyaknya *thread-thread* yang membahas tentang politik kemudian membuat Kaskus mengelompokkan *thread-thread*

tersebut dalam satu forum yakni dalam forum berita dan politik. Namun tidak menutup kemungkinan para Kaskuser membuat *thread-thread* mengenai permasalahan sosial, ekonomi dan politik di beberapa forum lain misalnya forum Berita Luar Negeri yang terdapat 65 *thread* membahas tentang permasalahan tersebut. Atau dalam forum Jokes & Cartoon dengan 39 *thread* yang membahas tentang permasalahan tersebut dalam bentuk kartun atau lelucon.

Perdebatan dalam ranah publik berkaitan dengan konsep demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah kata yang sering didengar di masyarakat. Ketika konsep demokrasi ini dibahas atau didiskusikan, semakin kabur makna dari demokrasi itu sendiri dan semakin sulit untuk menemukan contoh-contoh negara yang berbasis demokrasi. Di Indonesia yang merupakan negara berbasis demokrasi belum dapat mengimplementasikan makna dari demokrasi itu sendiri. Menurut Purnaweni (2004) dalam jurnalnya *Demokrasi Indonesia : Dari Masa ke Masa* menyatakan :

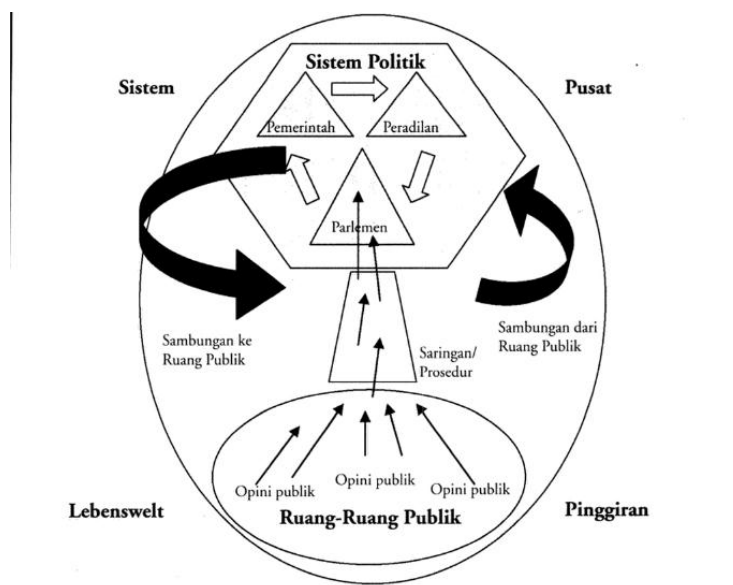
“Semaraknya perbincangan tentang sistem demokrasi di Indonesia bukan karena bangsa atau pemerintahan di negeri ini tidak mengenal sistem demokrasi. Justru sebaliknya, bangsa Indonesia pada aras implementasi sistem politik telah banyak memahami varian-varian demokrasi di dunia. Beberapa di antaranya bahkan telah diujicobakan di negeri ini: demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila. Namun berbagai varian demokrasi ini gagal memberikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi dalam arti yang sebenar-benarnya”

Dengan kata lain, negara Indonesia belum memahami makna sebenarnya dari demokrasi. Beberapa varian demokrasi yang telah diadaptasi dari negara berkembang dan diimplementasikan di Indonesia masih belum memberikan tatanan kehidupan berbangsa yang berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi dalam arti sebenarnya. Namun, Indonesia tidak sepenuhnya melupakan konsep demokrasi, salah satunya adalah demokrasi deliberatif.

Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia secara eksplisit berkembang pada era pasca Orde Baru. Hal ini disebabkan pintu kebebasan publik untuk berpikir kritis dibuka selebar-lebarnya. Pada awal sebelum lengsernya pemerintahan Orde Baru, rakyat harus tunduk kepada kekuasaan. Seluruh akses dan wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai ketimpangan yang ada dalam pemerintahan pada saat itu ditutup. Sehingga masyarakat hanya diperbolehkan untuk patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Namun setelah kekuasaan Orde Baru lengser, pintu demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Penyampaian opini-opini serta aspirasi untuk mengkritisi pemerintahan diperbolehkan dan

dibebaskan. Dari peristiwa ini demokrasi berkembang di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Seiring perkembangan teknologi, konsep demokrasi tidak hanya berkembang di dunia nyata, melainkan merambah ke ruang *cyber* dimana ruang tersebut mampu menyatukan opini-opini serta aspirasi dari berbagai wilayah di Indonesia tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Demokrasi deliberatif didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik sebagai legitimasi pembuat suatu keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Deliberatif atau Deliberasi menurut Hardiman (2004 :18) merupakan suatu terminologi yang berasal dari bahasa latin yaitu *deliberatio* yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah. Artinya terminologi tersebut menekankan pada proses pencapaian legitimasi atas keputusan politik dengan melibatkan publik untuk berkonsultasi. Pelibatan publik dalam proses ini dengan pertimbangan bahwa publik yang akan terkena imbas dari keputusan politik tersebut.

Keikutsertaan publik dalam proses menimbang keputusan publik ini berlangsung dalam ruang-ruang publik. Menurut Hardiman (2009 : 148) sebuah politik boleh menyatakan dirinya sebagai deliberatif hanya jika tersedia sebuah prosedur diskursif yang mentransformasikan pengaruh-pengaruh ruang publik – termasuk kekuasaan sosial – menjadi kekuasaan politis yang dihasilkan secara komunikatif. Dengan kata lain, ruang publik menjadi tempat yang sesuai untuk menyampaikan aspirasi secara diskursif. Habermas telah mendeskripsikan proses demokrasi deliberatif melalui sebuah model sebagai berikut :



Gambar 3.2 Demokrasi Model Bendungan Menurut Habermas

Model tersebut merupakan sebuah gambaran mengenai proses demokrasi di dalam masyarakat kompleks saat ini. Menurut Hardiman (2009 : 148) proses penemuan keputusan digambarkan sebagai arus komunikasi dari pinggiran menuju pusat formasi aspirasi secara diskursif. Pinggiran dalam hal ini diartikan sebagai ruang publik politis yang pada umumnya bertanggungjawab untuk menemukan, menafsirkan dan mengartikulasikan masalah-masalah sosial-politis sebagai masukan untuk pusat. Masukan dari pinggiran, yakni opini dan aspirasi dari ruang publik yang terungkap dalam komunikasi sehari-hari. Masukan-masukan ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa hukum melalui saringan untuk diteruskan ke dalam pemerintah, badan-badan parlementer dan partai-partai politik. Dari model ini dapat dilihat bahwa demokrasi deliberatif mengutamakan peran dari para warganegara yang membangun opini mereka secara publik dan mengendalikan arah pemerintahan secara tidak langsung melalui medium hukum. Sehingga, demokrasi deliberatif tidak dimengerti sebagai demokrasi langsung, melainkan sebagai kontrol diskursif atas pemerintahan karena demokrasi deliberatif menghormati garis batas antara negara dan masyarakat sekaligus mendesak agar negara hukum demokratis melancarkan komunikasi politis yang tersumbat di dalamnya.

Perdebatan dalam Kaskus menurut peneliti dapat dikatakan sebagai bentuk demokrasi deliberatif dengan mengikuti prasyarat komunikasi yang dikatakan oleh Habermas. Untuk mencapai konsensus rasional yang diterima umum. Sebuah demokrasi yang deliberatif, menurut Habermas dalam makalah Hardiman berjudul *Etika Politik Habermas*, dapat mencapai konsensus rasional apabila mampu mencapai tiga prasyarat komunikasi :

“Pertama keikutsertaan di dalam sebuah diskursus hanya mungkin, jika orang mempergunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantis dari bahasa tersebut. Kedua, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud, jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus, bertanggungjawab sejajar dan tidak menganggap mereka ini hanya sebagai sarana belaka. Ketiga, harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus berkat ‘paksaan tidak memaksa dari argumen yang lebih baik’” (F.Budi Hardiman. Etika Politik Habermas. 2010)

Ketiga prasyarat komunikasi tersebut ditemui peneliti dalam forum *debate club* Kaskus. Prasyarat yang pertama adalah penggunaan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantis dari bahasa tersebut. Prasyarat yang kedua adalah setiap peserta memiliki maksud yang sama yakni mencapai konsensus yang tidak memihak. Prasyarat ketiga adalah adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi secara umum dengan tujuan mengamankan proses diskursus dari diskriminasi dan tekanan antar Kaskuser

Ruang publik bukanlah sekedar tempat fisik. Namun ruang publik terbentuk melalui komunikasi antara warga itu sendiri yang mereproduksi ruang di antara mereka. Hannah Arendt dalam Hardiman (2010) menyatakan bahwa :

“Suatu ruang penampakan terjadi di tempat orang-orang saling berinteraksi dengan bertindak dan berbicara. Ruang itulah yang menjadi dasar semua pendirian dan bentuk negara. Ruang itu ada secara potensial pada setiap himpunan orang, memang hanya secara potensial; ia tidak secara nisaya diaktualisasi di dalam himpunan itu dan juga tidak dapat dipastikan untuk selamanya atau untuk waktu tertentu” (Arendt, Hannah. 1996:251)

Dalam pernyataan tersebut, Arendt menggambarkan sebuah ruang publik yang terbentuk oleh warga itu sendiri. Warga lah yang mereproduksi makna suatu ruang menjadi sebuah ruang publik. Ruang publik yang dimaksud Arendt lebih pada sebuah potensi yang terbentuk dari hasil reproduksi makna dari warga yang ada di dalamnya. Sehingga, ruang publik ini tidak dapat dipastikan untuk selamanya atau dalam waktu tertentu. Menarik pernyataan dari Hardiman (2010) bahwa ruang publik adalah hasil dari kegiatan komunikasi untuk menggalang solidaritas warganya, maka Kaskus dapat dikatakan sebagai sebuah ruang publik dalam ranah ruang maya. Dengan kata lain, Kaskus dimaknai sebagai ruang publik melalui proses komunikasi yang terbentuk antar Kaskuser yang ada dalam website tersebut yakni proses pertukaran informasi antar Kaskuser dan forum diskursifnya. Bentuk pertukaran informasi ini melalui *thread-thread* yang diposting oleh Kaskuser dalam sebuah forum.

Akan tetapi, Kaskus masih belum dapat dikatakan sebagai bentuk utuh dari ruang publik. Karlina Supelli dalam Hardiman (2010) menjelaskan beberapa ketidakrelevanan yang terjadi dalam ruang publik dunia maya. Pertama, informasi yang mengalir deras dari berbagai arah memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia ikut serta mendiskusikan banyak perkara sekaligus, tetapi cenderung juga cepat lupa karena setiap perkara segera tertindih dan tergulung ke dalam perkara lain. Kedua, muncul gejala lain yakni bersumber dari kesalingterhubungan antara teks dengan situs lain (*Hyperlink*). *Hyperlink* ini merupakan suatu teks yang akan mengarahkan ke tampilan dokumen atau halaman lain yang terkait. Adanya *hyperlink* ini memunculkan sebuah kondisi yakni *playful surfing*. Menurut Karlina dalam Hardiman (2010) *playful surfing* adalah sebuah kondisi dimana orang atau pengguna internet hanya tergoda untuk sekedar bermain-main menonton internet, yang pada gilirannya justru memicu rasa ingin tahu yang malas. Ketiga, tidak ada beda antara informasi yang penting dengan yang tidak penting terutama dalam *thread-thread* yang tertulis dalam forum *debate club* Kaskus.

Pseudonimitas atau bentuk lain dari Anonimitas didefinisikan sebagai pemakaian identitas baru untuk menutupi identitas asli di dunia nyata. Penggunaan identitas baru ini dengan tujuan untuk mengaburkan identitas individu sehingga individu tersebut bebas melakukan apapun. Pseudonimitas ini menjadi sebuah keunikan bagi Kaskus sehingga membuat individu dapat membuat banyak identitas dalam Kaskus. Pseudonimitas dalam Kaskus digunakan untuk menyerang argumen atau bahkan menghina, mengejek atau menyerang argumen kubu tertentu. Menurut Priyanto dalam jurnalnya "*Identitas Diri dan Dunia Maya*" menyatakan bahwa identitas individu ditentukan oleh komunitasnya yang membentuk dirinya memiliki PIO (Personal Identity Online). *Infosphere* bukan lagi merupakan media, tetapi lingkungan dimana komunitas maupun individu terus membentuk identitas. Dalam pernyataan tersebut, Ida Priyanto menekankan pada identitas dibentuk oleh komunitas yang membentuk dirinya memiliki PIO (Personal Identity Online). Pada fenomena Pilpres 2009, muncul dua kubu besar dalam Kaskus yang saling bertentangan dan saling menyerang hingga menghinda di setiap *thread* dalam forum. Kemunculan kubu-kubu yang masih beredar di Kaskus hingga saat ini disebabkan oleh kebebasan Kaskuser untuk membuat akun lebih dari satu akun sehingga Kaskuser lain tidak mampu melacak keberpihakan dari akun tersebut. Ketidakmampuan untuk melacak ini digunakan Kaskuser untuk menyerang argumen kubu lawan dengan bebas atau bahkan dapat berpotensi menjadi sebuah bentuk adu domba antar kubu.

KESIMPULAN

Secara definisi, ruang publik sebenarnya memiliki dua bentuk yakni ruang publik fisik dimana ruang tersebut dapat dilihat dan menjadi ruang untuk berkumpul. Sedangkan bentuk kedua adalah ruang publik metafora yang dalam hal ini adalah ruang publik yang dikonsepsikan oleh Habermas. Ruang publik ini terbentuk dari reproduksi makna yang ada didalamnya. Peran aktor-aktor komunikasi yang ada dalamnya mampu menciptakan makna dari ruang publik. Sehingga ruang publik ini terbentuk secara potensial dan tidak dapat diketahui rentang waktu keberadaannya.

Demokrasi deliberatif sebenarnya merupakan sebuah demokrasi yang menimbang melalui musyawarah yang terjadi diantara masyarakat warga dalam sebuah ruang publik. Demokrasi deliberatif mempunyai sifat menghormati garis batas yang tegas antara negara dengan masyarakat. Namun demokrasi deliberatif ini memaksa masyarakat untuk mendorong garis batas tersebut, bukan melewati, sehingga demokrasi deliberatif ini tidak mencampuri sistem yang ada dalam negara. Dorongan-dorongan tersebut berasal dari opini-opini yang

berkembang di masyarakat terhadap sebuah fenomena sekitar melalui ruang publik. Opini-opini muncul dari kegelisahan-kegelisahan politis yang dialami oleh masyarakat

Kaskus memang berpotensi untuk menjadi sebuah ruang publik dan menjadi alternatif ruang publik di dunia nyata karena sifat teknologi informasi sendiri yang mampu menghubungkan beberapa individu tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Akan tetapi, Kaskus masih belum dapat dikatakan mampu mengganti kaidah ruang publik dalam dunia nyata karena Kaskus beberapa ketidakrelevanan ruang maya untuk dijadikan sebagai ruang publik. Derasnya arus informasi dan kemudahan pengguna untuk mendapatkan informasi menjadi dua dari beberapa alasan ruang maya masih belum dapat dijadikan sebagai ruang publik secara utuh namun masih ada potensi untuk menjadi sebuah ruang publik yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2001. Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS
- Gibson, William. 1984. Neuromancer. UK : Hachette
- Habermas, Jurgen. 1989. The Structural Transformation of The Public Sphere
- Hardiman, F. Budi. 2004. "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?", Yogyakarta: Majalah BASIS, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember
- _____. 2010. Ruang Publik : Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta : Kanisius
- Maryani, Eni. 2011. Media dan Perubahan Sosial : Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Priyanto, Ida. F. 2010. Identitas Diri dan Dunia Maya.
- Purnaweni, Hartuti. 2004. *Demokrasi Indonesia : Dari Masa ke Masa*. Jurnal Administrasi Publik, vol.3, no.2.
- Suparlan, Parsudi. 2004. Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas : Memperjuangkan Hak - Hak Minoritas
- https://www.academia.edu/8416866/Makalah_Etika_Politik_Habermas_Oleh_F._BUDI_HARDIMAN (diakses pada tanggal 13 Mei 2017)